KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Legislatif Dipilih Rakyat untuk Menjadi Oposisi
Tanggal : Sabtu, 06 Juli 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Legislatif Dipilih Rakyat untuk Menjadi Oposisi

● FEBRIANTO ADI SAPUTRO, SAPTO ANDIKA CANDRA

JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, banyak yang salah kaprah memahami konsep oposisi dan koalisi dalam sistem presidensial. Dia mengatakan, lembaga legislatif atau parlemen dalam sistem presidensial berarti oposisi terhadap eksekutif.

Fahri menjelaskan, di dalam sistem presidensial memang tidak dikenal oposisi sebagaimana sistem parlementer. Namun, menurut dia, cara pandang memilih anggota legislatif di negara dengan sistem presidensial berbeda dengan negara yang menganut sistem parlementer.

"Waktu rakyat memilih presiden atau gubernur atau bupati, wali kota, rakyat itu bilangnya '*eh* saya pilih kamu tolong laksanakan ini uangnya, ini kewenangannya tolong jalankan roda pembangunan'. Tapi, kalau milih DPR-nya, rakyat *ngomongnya* 'saya pilih kamu DPR tolong awasi itu pemerintahan', jadi awasi di sini artinya oposisi," kata dia, di Jakarta, Jumat (5/7).

Menurut dia, banyak yang masih belum memahami konsep seperti ini. Ketidakpahaman itu menimbulkan kebingungan dalam menempatkan diri dalam konstelasi presidensial. Hal itulah, menurutnya, yang terjadi pada PAN dalam periode sebelumnya yang menempatkan kadernya di kursi menteri. Imbasnya, PAN di legislatif pun diminta untuk diam.

"Legislatif *nggak* boleh disuruh diam. Akad dia (legislatif) dengan rakyat itu oposisi. Jadi, dalam pemerintahan presidensial oposisi diciptakan oleh rakyat melalui pemilihan legislatif, tetapi dalam sistem parlementer oposisi diciptakan oleh kemampuan melahirkan koalisi," ujar dia.

Fahri juga menyindir Partai Gerindra yang dikabarkan akan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan dengan imbalan kursi menteri. Dia justru mempertanyakan pentingnya kursi menteri tersebut. "Katakanlah *kayak* Gerindra sekarang mau dapat menteri terus itu kemudian menjadi hebat? Apa? *nggak* ada," ujar Fahri.

Isyarat beberapa partai pendukung Prabowo-Sandi bergabung dengan koalisi pemerintahan kian kencang. Sejumlah partai politik yang sebelumnya berseberangan, seperti Gerindra, PAN, dan Demokrat, kini berpeluang merapat.

Namun, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Saleh Daulay Partaonan menilai, anjuran Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta agar PAN tidak bergabung dengan koalisi pemerintah perlu dipertimbangkan. Sebagai tokoh pendiri dan senior PAN, suara Amien menjadi referensi bagi PAN dalam mengambil keputusan.

Nantinya, nasihat tersebut akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN yang rencananya digelar akhir Juli ini. "Nanti diusahakan yang disampaikan di forum dan Pak Amien sangat demokratis bisa mendengar dan melihat ini yang disampaikan nasihat, tentu sebagai orang tua yang sangat kita tuakan perlu kita dengar secara serius," ujar Saleh.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memandang bahwa mekanisme *checks and balances* alias pengawasan dan keseimbangan tetap diperlukan dalam sistem demokrasi. Perkataan Moeldoko ini menyangkut pembahasan koalisi Jokowi-Ma'ruf yang masih dinamis.

"Penguatan koalisi pasti selalu terjadi kepada siapa pun karena Pak Jokowi selalu memikirkan bagaimana negara ini dibangun bersama. Tapi, juga pertimbangan *check and balances* itu tidak boleh diabaikan sebagai negara demokrasi," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, seluruh pendukung Jokowi-Ma'ruf tak perlu lagi berpikir mengenai 'jatah' apa yang akan didapat setelah ini. "Saya bisa memahami bahwa situasi ini, situasi yang dari sebenarnya dalam konteks lebih luas itu, sekali lagi kita jangan terjebak hanya memikirkan 'gua dapat apa', tapi bicara negara," ujar dia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan agar pos menteri jangan hanya diisi oleh mereka yang berjasa dalam pilpres. Pos menteri harus dapat diisi oleh sosok yang profesional dan bertanggung jawab. "Jika semua urusan pos menteri berlatar hanya soal jasa politik, ini tentu akan mengancam rencana pembangunan negara," kata aktivis ICW Adnan Topan.

■ mabruroh **ed:** mas alamil huda